



 PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG		NOMOR SOP : TANGGAL PEMBUATAN : TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF :	531.8 TAHUN 2025 10 Juni 2025 2025 2025 S/D ADANYA REVISI SELANJUTNYA KEPALA DINAS 3AP2KB
DISAHKAN OLEH		 Dr. TI HAR, SE. M.S. PEMBINA TINGKAT I/ IV b NIP.197306052001121005	2025 S/D ADANYA REVISI SELANJUTNYA KEPALA DINAS 3AP2KB
NAMA SOP :		PEMBAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN	PEMBAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN
DASAR HUKUM		1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH 3. PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 4. PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER 5. PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG 6. PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7. PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 8. PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PEMBAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN		1. DASAR HUKUM PENUNJANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG 2. DAFTAR NAMA STAKEHOLDER INTERNAL PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG	PEMBAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN
PENGANTARAN		1. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TIDAK AKAN ADANYA PEMBENTUKAN POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA TANGERANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 2. JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGHAMBAT PROSES PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG	PEMBAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN

		PEMERINTAH KOTA TANGERANG				NOMOR				
		DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN				NO. REVISI/TERBITAN				
		SOP PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA)				TANGGAL BERLAKU				
						HALAMAN				
NO	PROSES	KETUA TIM KERJA	KABID	KADIS	BAGIAN HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	MENGUSULKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA					DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	3 JAM	DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA		
2	MEMBUAT DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA					DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	3 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA		
3	MENGAJUKAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA KE BAGIAN HUKUM					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	24 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA		
4	MENGKOREKSI DAN PROSES PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA KE BAGIAN HUKUM					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	80 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA		
5	MENYAMPAIKAN SURAT PENGANTAR DAN SURAT KEPUTUSAN KEPADA DINAS DARI BAGIAN HUKUM					SURAT PENGANTAR DAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	3 JAM	SURAT PENGANTAR DAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA		
6	MENYAMPAIKAN SURAT KEPUTUSAN KE BAGIAN HUKUM DAN MENYIMPAN					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	1 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA		
7	MENDISTRIBUSIKAN SURAT KEPUTUSAN KE POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	24 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA		
					JUMLAH					
					138 JAM					